

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Sejak kemerdekaannya pada 17 Agustus 1945, Indonesia menandai tonggak sejarahnya dengan berpartisipasi aktif di kancah internasional. Amerika Serikat (AS) kemudian menjadi salah satu negara yang menjalin hubungan diplomatik dengan Indonesia pada tahun 1949 pasca kemerdekaan, hubungan bilateral tersebut kemudian berkembang sejak pengakuan diplomatik resmi kedua negara. Mengawali era demokrasi, kerja sama Indonesia dan AS telah meluas ke berbagai bidang, dengan pendidikan menjadi salah satu pilar strategis kedua negara. Kerja sama ini bertujuan untuk meningkatkan pengembangan sumber daya manusia, meningkatkan pemahaman lintas budaya, mendorong inovasi dan penelitian kolaboratif. Kolaborasi pendidikan menciptakan berbagai inisiatif, seperti program pertukaran pelajar dan pembelajaran antarbudaya. Kedua negara mengakui peran pendidikan antarbudaya dalam mendorong saling pengertian dan pembangunan bangsa (U.S. Departement of State, 2024).

Kerja sama pendidikan antara Indonesia dan AS telah dimulai sejak tahun 1952 melalui pemberian Beasiswa *Fulbright* yang dalam perkembangannya kemudian dilaksanakan oleh lembaga *American Indonesian Exchange Foundation* (AMINEF). Dalam Nota Kesepahaman

(MoU) antara Pemerintah AS dan Pemerintah Republik Indonesia tentang pembentukan lembaga *The American-Indonesian Exchange Foundation* (AMINEF), kedua belah pihak menginginkan untuk melanjutkan serta memperluas program dan kegiatan yang tercantum dalam “Perjanjian Pendidikan dan Kebudayaan antara Pemerintah Republik Indonesia dan Pemerintah Amerika Serikat” yang ditandatangani di Jakarta pada 15 Juli 1992, untuk mempromosikan keterlibatan yang lebih luas dan pemahaman timbal balik berkelanjutan antara rakyat AS dan Indonesia melalui kerja sama di bidang pendidikan (U.S. Departement of State, 2009).

MoU antara Indonesia dan AS tentang AMINEF, mengatur prosedur teknis pemberian beasiswa *Fulbright* melalui mekanisme pembebasan atau remisi biaya kuliah serta pertanggung jawaban biaya hidup pelajar Indonesia di AS. Selain itu, kerja sama pendidikan antara Indonesia dan AS juga dilaksanakan melalui organisasi *US-Indonesia Society* (USINDO), dengan penandatanganan MoU tentang Kerja Sama Pendidikan, Sosial, dan Kebudayaan pada 15 Mei 2006.

Hingga pada Oktober 2015, Presiden Jokowi dan Presiden Obama sepakat untuk meningkatkan kemitraan bilateral Indonesia dan AS menjadi “Kemitraan Strategis”. Keduanya mengakui kontribusi dari masyarakat sipil dan sektor swasta untuk hubungan antar negara yang lebih luas, keterlibatan masyarakat sipil dan jalur non-pemerintah dinilai penting bagi vitalitas Kemitraan Strategis Indonesia dan AS. USINDO bertujuan untuk memfasilitasi keterlibatan tersebut untuk membantu

memperkuat hubungan Indonesia-AS. (USINDO, n.d.).

Lebih lanjut, kerja sama pendidikan antara Indonesia dan AS terus berkembang dengan berbagai penandatanganan MoU di bidang pendidikan, teknologi, dan kebudayaan. Kedutaan Besar AS juga turut serta mendorong hubungan persahabatan antara pemuda Indonesia dan Amerika dengan membuka pusat budaya AS yang dikenal dengan *@america* di Jakarta pada 6 Desember 2010. *@america* menjadi satu-satunya pusat budaya AS di dunia di mana pengunjung dapat menonton berbagai siaran multimedia, hingga tontonan kehidupan interaktif tentang cara hidup masyarakat Amerika.

Melalui program-program yang ditawarkan oleh Departemen Luar Negeri AS, pelajar muda Indonesia dan AS berkesempatan untuk terlibat dalam pertukaran budaya, pendidikan, hingga level profesional, yang memperkuat hubungan antar-masyarakat kedua negara (U.S. Department of State, n.d.). Pendidikan antarbudaya diharapkan dapat meningkatkan pengertian, toleransi, dan persahabatan di antara semua bangsa, kelompok, ras atau agama, sehingga berkontribusi pada perdamaian global. Dalam konteks hubungan internasional yang sering kali bersinggungan dengan keberagaman budaya, eksistensi pertukaran pendidikan dan budaya memberikan gambaran mengenai peran penting pemahaman antarbudaya yang tidak hanya menjembatani perbedaan lanskap budaya, tetapi dapat membina hubungan diplomatik yang kuat, khususnya antara Indonesia dan AS.

Program inisiatif pendidikan antarbudaya melibatkan generasi muda sebagai jembatan untuk kedua negara. Dengan keterlibatan pemuda, program ini berfungsi sebagai bentuk diplomasi publik yang dinamis yang membentuk persepsi masyarakat internasional. Inisiatif ini menekankan penggunaan *soft power* untuk mengurangi potensi konflik dan mempromosikan perdamaian global. Menurut Joseph S. Nye (2019), *soft power* adalah kemampuan untuk mempengaruhi pihak lain agar mendapatkan hasil yang diinginkan melalui daya tarik dan persuasi, bukan paksaan. Dalam politik internasional, *soft power* suatu negara memiliki tiga aspek penting sebagai pendorong, yaitu budaya, nilai-nilai politik, dan kebijakan luar negeri.

Hubungan antar-masyarakat yang harmonis mencerminkan keberhasilan diplomasi publik yang terbentuk dari sikap toleransi tanpa pendekatan represif atau pemaksaan, hal itu mempengaruhi *soft power* suatu negara. Diplomasi publik program pertukaran di bidang pendidikan internasional merupakan cara untuk mengembangkan citra suatu negara dan membentuk kebijakan luar negerinya dalam kerangka yang positif. Persepsi suatu negara akan terbentuk dari interaksi langsung antar-masyarakat dari berbagai negara (Tutar & Hyams-Ssekasi, 2021). Diplomasi publik muncul sebagai respons terhadap transformasi dunia, seperti mobilitas individu yang meningkat karena perkembangan teknologi transportasi dan komunikasi. Akses pendidikan yang lebih berkembang telah mempengaruhi cara berpikir individu yang mendorong

keterlibatan dalam membentuk hubungan internasional.

Salah satu praktik diplomasi publik yang dilakukan oleh Indonesia dan AS melibatkan beragam aktor non-negara, termasuk Organisasi Non-Pemerintah (NGO). Konsep NGO diperkenalkan dalam pasal 71 Piagam Perserikatan Bangsa-Bangsa pada tahun 1945, yang digunakan secara luas oleh AS, Uni Eropa, dan aktor internasional lainnya. Menurut Burlinova (2022) NGO harus bersifat nirlaba dan independen dari pemerintah, misalnya *think tanks*, lembaga politik, gereja, asosiasi sukarela, organisasi amal, pemantau pemilu independen, pusat penelitian, lembaga budaya, dan sebagainya. NGO dapat berperan sebagai jembatan antara pemerintah dan masyarakat sipil.

David Lewis & Nanzeen Kanji (2009) mendefinisikan NGO sebagai organisasi nirlaba yang mempunyai lima karakteristik. Pertama, bersifat formal yang berarti organisasi yang dilembagakan dalam bentuk pertemuan rutin, kantor pendukung, dan kelengkapan lainnya. Kedua, bersifat privat yang secara institusi terpisah dari pemerintah, namun dapat menerima dukungan dari pemerintah. Ketiga, berorientasi nirlaba yang mana direksi atau pemilik tidak mengambil keuntungan dana yang dihasilkan. Keempat, pengelolaan sendiri yang berarti mampu mengendalikan dan mengatur urusan sendiri. Kelima, bersifat sukarela (*voluntary*). Seiring perkembangan sistem internasional, semakin banyak NGO yang bergerak melampaui batas negara, menjadi aktor hubungan internasional dan diplomasi publik.

Terdapat dua NGO yang terlibat dalam praktik diplomasi Indonesia-AS, yaitu Bina Antarbudaya di Indonesia dan *AFS Intercultural Programs* yang berkantor pusat di New York, AS. Kehadiran Bina Antarbudaya dan *AFS Intercultural Programs* di Indonesia dilatarbelakangi oleh komitmen bersama untuk membentuk pemahaman global dan pembelajaran antarbudaya. Lynn Lawry (2009) dalam “*Guide to Non-Governmental Organizations for the Military*”, NGO diklasifikasikan berdasarkan fokus orientasi atau skala operasinya. NGO berdasarkan orientasinya, yaitu berorientasi amal; berorientasi pelayanan; berorientasi partisipatif; dan berorientasi pemberdayaan. Dalam konteks ini, Bina Antarbudaya dan *AFS Intercultural Programs* termasuk dalam klasifikasi NGO berorientasi pelayanan karena fokus utamanya adalah memfasilitasi pertukaran budaya dan program layanan pendidikan yang inklusif.

Kegiatan Bina Antarbudaya dan *AFS Intercultural Programs* meliputi penyelenggaraan program pertukaran pelajar SMA se-derajat, hingga level profesional, memberikan pengalaman antarbudaya, dan mendorong kolaborasi internasional. Keterlibatan AFS sebagai NGO dalam kolaborasi internasional, kemudian membuat Organisasi Pendidikan, Ilmu Pengetahuan, dan Kebudayaan Perserikatan Bangsa-Bangsa (UNESCO) memberikan AFS “Status Konsultatif” pada April 2015, yang diharapkan untuk menciptakan kolaborasi kepentingan bersama (*AFS Intercultural Programs*, n.d.). “Status Konsultatif” adalah status yang memungkinkan NGO untuk berpartisipasi dalam program UNESCO, serta memperoleh

informasi dan dukungan dari UNESCO.

Pada penelitian terkait, skripsi “Peran Diplomasi Pendidikan Amerika Serikat terhadap Indonesia (Studi pada Program *YES Kennedy-Lugar*)” oleh Nadia Maretha Pakpahan menjelaskan bahwa program pertukaran pelajar *Kennedy Lugar Youth Exchange Study* (KL-YES) adalah bentuk manifestasi diplomasi publik bidang pendidikan AS, yang bertujuan untuk menumbuhkan *mutual understanding* antara Indonesia dan AS. Inisiatif tersebut juga berfungsi sebagai upaya AS untuk membentuk kembali dan meningkatkan citra globalnya pasca peristiwa 911, mengatasi persepsi negatif melalui keterlibatan budaya dan pendidikan.

Selanjutnya dalam artikel jurnal berjudul “Diplomasi Publik dan *Soft Power*: Sama atau Berbeda?” oleh Sofia Trisni dan Ardila Putri menjelaskan bahwa diplomasi publik dan *soft power* adalah dua hal yang sering dikaitkan, keduanya merupakan dua konsep yang berbeda, namun saling terhubung. Diplomasi publik mengacu pada aktivitas interaktif oleh aktor hubungan internasional dengan tujuan menjangkau publik. Sedangkan, *soft power* adalah instrumen dari diplomasi publik, *power* yang ingin dipromosikan, dikembangkan, atau dihasilkan. *Soft power* mengacu pada kemampuan untuk membentuk perspektif dan menarik perhatian dengan mempromosikan budaya, nilai, dan kebijakan suatu negara tanpa paksaan. Jadi, kedua konsep ini saling terhubung dalam tugasnya, menurut Joseph Nye, bahkan strategi komunikasi yang baik pun tidak dapat berhasil jika pesan yang mendasarinya tidak menarik. Konteks

ini mengacu pada budaya, nilai, dan kebijakan suatu negara yang tidak memiliki daya tarik, maka diplomasi publik yang dilakukan tidak dapat menghasilkan *soft power*.

Kedua literatur tersebut berfokus pada interaksi antara diplomasi publik dan *soft power* dalam konteks diplomasi pendidikan. Keduanya menekankan bagaimana inisiatif diplomasi publik bertujuan menghasilkan *soft power* suatu negara. Praktik diplomasi yang efektif dan tepat dapat memperkuat hubungan bilateral dan juga meningkatkan *soft power* dengan membentuk perspektif dan promosi daya tarik berbasis budaya dan kebijakan. Dalam hal ini, Bina Antarbudaya sebagai aktor diplomasi publik Indonesia dan *AFS Intercultural Programs* sebagai aktor diplomasi publik AS terlibat secara aktif dalam kerja sama kedua negara yang didasari oleh program pertukaran pendidikan dan pemahaman antarbudaya.

Penelitian ini berfokus pada topik kontribusi Bina Antarbudaya dan *AFS Intercultural Programs* sebagai NGO terhadap kerja sama pendidikan Indonesia dan AS. Dengan memprioritaskan bidang pendidikan yang bertujuan untuk mengeksplorasi interaksi dinamis antar individu, penelitian ini tidak hanya membahas bagaimana Bina Antarbudaya sebagai penghubung antara Indonesia dan *AFS Intercultural Programs* di AS menjaga hubungan baik, dan membangun kepercayaan kedua belah pihak. Tetapi juga membahas, bagaimana sebuah NGO berkontribusi dalam praktik diplomatik non-formal suatu negara. Sejalan dengan ini,

studi ini berupaya menjelaskan bagaimana program pertukaran pendidikan dan pemahaman antarbudaya berkontribusi dalam membentuk diplomasi publik, dan mendorong perkembangan masyarakat secara global.

1.2 Batasan dan Rumusan Masalah

Batasan masalah yang ditetapkan dalam penelitian ini adalah fokus pada peran strategis Bina Antarbudaya dan *AFS Intercultural Programs*, serta kontribusi program inisiatif dari pemerintah AS terhadap kerja sama pendidikan Indonesia dan AS. Oleh karena itu, berdasarkan topik tersebut, rumusan masalah yang diangkat penulis dalam skripsi ini sebagai berikut:

1. Bagaimana peran strategis Bina Antarbudaya dan *AFS Intercultural* sebagai aktor non-negara dalam menjalankan diplomasi pendidikan antara Indonesia dan AS?
2. Bagaimana inisiatif program pertukaran pelajar pemerintah Amerika Serikat berkontribusi terhadap kerja sama bidang pendidikan antara Indonesia dan Amerika Serikat?

1.3 Tujuan dan Manfaat Penelitian

1) Tujuan Penulisan

Penelitian ini ditujukan untuk menjelaskan kontribusi Bina Antarbudaya mitra *AFS Intercultural Programs* sebagai NGO terhadap kerja sama pendidikan Indonesia dan AS melalui program pertukaran pelajar dan pemahaman antarbudaya.

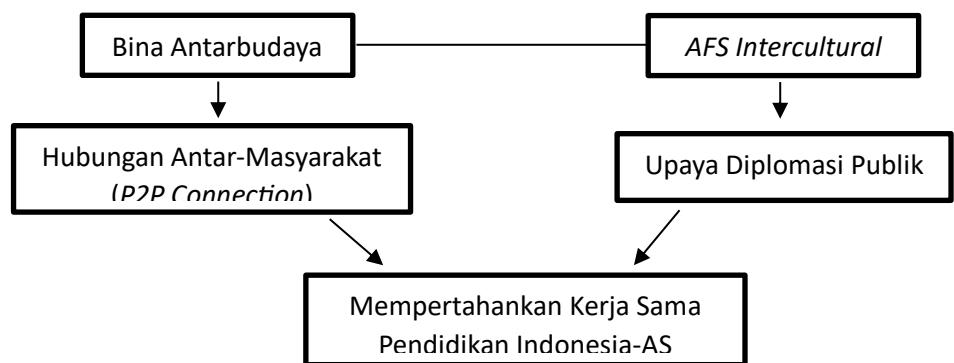
2) Manfaat Penelitian

Penelitian ini diharapkan memberikan penjelasan mengenai peran NGO sebagai aktor non-negara dalam menjembatani kerja sama pendidikan dan membentuk diplomasi publik kedua negara. Penelitian ini juga berupaya memberikan penjelasan bagaimana program pertukaran pelajar bermanfaat terhadap pendidikan dan pemahaman antarbudaya generasi muda. Selanjutnya hasil penelitian ini diharapkan dapat membantu sebagai sumber referensi terhadap penelitian selanjutnya.

1.4 Kerangka Konseptual

Dalam praktik hubungan internasional, diplomasi tidak hanya sebagai alat negosiasi dan mencegah terjadinya suatu konflik, tetapi juga sebagai wadah diplomasi publik untuk membangun citra positif suatu negara. Diplomasi publik yang dilakukan melalui program pendidikan dan pemahaman antarbudaya, berfungsi sebagai instrumen penting dalam membangun toleransi dan membina hubungan positif antar bangsa. AS telah memanfaatkan program pertukaran pendidikan sebagai instrumen penting dari upaya diplomasi publiknya untuk mengembangkan *soft power* nya. Dalam konteks ini, inisiatif program pertukaran pelajar yang diprakarsai oleh Bina Antarbudaya dan *AFS Intercultural Programs*

memfasilitasi generasi muda untuk membangun jembatan antara individu dari latar belakang budaya yang berbeda. Program-program ini dirancang untuk meningkatkan kesadaran budaya, empati, dan pemahaman komunikasi lintas budaya. Penelitian ini mengidentifikasi dua variable independen utama yaitu kerja sama NGO dan kerja sama pendidikan Indonesia-AS.



Tabel 1.1: Kerangka Konseptual

Kerangka ini menunjukkan bahwa, melalui kolaborasi Bina Antarbudaya dan *AFS Intercultural Programs*, terdapat upaya untuk mengembangkan diplomasi antar-masyarakat, dengan berkembangnya upaya diplomasi publik dan hubungan *people-to-people* itu akan mempertahankan hubungan kerja sama bidang pendidikan Indonesia dan AS.

1.4.1 Diplomasi Publik

Diplomasi publik sering kali dilaksanakan dengan tujuan untuk memajukan kepentingan kebijakan luar negeri tertentu suatu negara. Diplomasi publik menjadi instrumen strategis bagi pemerintah untuk

mempengaruhi publik, menumbuhkan sikap toleransi yang saling pengertian, dan membangun hubungan yang sejalan dengan tujuan strategis suatu negara yang lebih luas. Ketika negara-negara berupaya membentuk kembali citra mereka di panggung global dan berupaya untuk mengelola reputasinya, hal itu dapat dilihat sebagai salah satu sumber utama kekuatan suatu negara.

Efektivitas diplomasi publik suatu negara sebagian besar berasal dari bagaimana hal itu dapat dirasakan oleh publik asing atau secara global, mencakup pemerintah, organisasi, atau warga negara. Paul Sharp dalam buku Jan Melissen (2005) yang berjudul "*The New Public Diplomacy: Soft Power in International Relations*" mendefinisikan bahwa diplomasi publik sebagai proses di mana hubungan langsung dengan orang-orang di suatu negara diupayakan untuk memajukan kepentingan dan memperluas nilai-nilai yang diwakilinya. Di sisi lain menurut Tuch, diplomasi publik merupakan proses komunikasi pemerintah dengan publik asing dalam upaya menciptakan pemahaman tentang ide dan cita-cita negaranya, lembaga dan budayanya, serta tujuan dan kebijakan nasionalnya.

Menurut Jan Melissen (2005), praktik diplomasi terjadi dalam lingkungan lebih luas daripada konsep hubungan internasional yang hanya berpusat pada negara yang hierarki. Argumen tersebut berhubungan dengan pendapat Brian Hocking (2005) yang menyoroti dinamika yang terjadi dalam diplomasi publik, bahwa pentingnya kolaborasi dan saling belajar antar aktor. Intinya, diplomasi publik berkembang di atas saling

ketergantungan. Dengan kerja sama dan saling belajar antar aktor, bidang ini dapat berkembang untuk memenuhi kompleksitas lanskap global yang berubah-ubah, dan membuatnya lebih inklusif, dinamis, dan efektif.

Berkaitan dengan itu, Signitzer dan Coombs (1992) mendefinisikan diplomasi publik sebagai sarana bagi pemerintah dan entitas swasta untuk mempengaruhi opini publik, yang akan mempengaruhi keputusan kebijakan luar negeri suatu negara. Menurut mereka, diplomasi publik melampaui kegiatan diplomasi konvensional “*government to government*”, dengan melibatkan beragam aktor dan isu yang lebih luas mencakup kehidupan sehari-hari. Cakupan tersebut memperluas praktik diplomasi dengan interaksi dari aktor non-negara yang menciptakan proses diplomatik yang lebih transparan dan partisipatif. Mereka berpendapat bahwa diplomasi publik yang efektif bergantung pada persuasi dan daya tarik kebijakan daripada tindakan yang koersif. Hal tersebut sejalan dengan konsep Joseph Nye mengenai *soft power*, yang mana kemampuan untuk membentuk persepsi melalui daya tarik.

1.4.2 *Non-Governmental Organization*

Aktor non-negara merupakan organisasi, kelompok, atau individu yang tidak tergabung dalam institusi pemerintah, mereka memiliki kemampuan untuk memengaruhi atau membuat perubahan dalam skala lokal, nasional, atau global. Craig Warkentin (2005), mendefinisikan bahwa *Non-Governmental Organizations* (NGO) merupakan suatu entitas swasta, sukarela, dan nirlaba. Dalam hubungan internasional, NGO

merujuk pada sebuah kelompok atau organisasi yang keanggotaan dan aktivitas organisasinya melintasi batas-batas nasional. Oleh karena itu NGO juga dikenal dengan istilah *International Non-Governmental Organizations* (INGO). NGO adalah entitas independen yang muncul sebagai aktor non-negara yang memberikan pengaruhnya dalam praktik hubungan internasional. Independensi NGO terlihat dari fleksibilitas dan netralitas dalam menentukan tujuan, mengatasi dan merespon isu-isu tertentu tanpa intervensi politik langsung.

Menurut Ann Marie Clark (1995), NGO pada dasarnya berbeda dari negara yang perlu menyeimbangkan banyak tanggung jawab, sedangkan NGO memiliki fokus yang sempit dari serangkaian isu. Hal itu memungkinkan NGO untuk mengembangkan komitmen yang mendalam terhadap tujuan mereka, seperti yang terlihat pada NGO dalam kasus *Amnesty International*, yang hanya berkonsentrasi dalam mempromosikan Deklarasi Universal Hak Asasi Manusia. Dengan tujuan eksklusif, dan sifat independensi yang dimiliki oleh NGO, mereka memiliki kapasitas untuk menggerakkan opini publik global yang mempengaruhi perilaku negara secara eksternal. Kapasitas NGO memposisikan mereka sebagai aktor yang kuat dalam sistem kontemporer hubungan internasional. Namun, keberhasilan NGO dalam mempengaruhi negara-negara bergantung pada kemampuan NGO untuk membangun hubungan yang kuat dengan aktor domestik.

Dalam website resmi *United Nations Development Programme*

(UNDP), NGO didefinisikan sebagai organisasi, kelompok, atau lembaga nirlaba yang beroperasi secara independen dari pemerintah yang memiliki tujuan kemanusiaan atau pembangunan. Jika NGO ditunjuk untuk melaksanakan proyek UNDP, NGO tersebut harus memiliki status hukum untuk beroperasi sesuai dengan undang-undang yang mengatur NGO di negara program. Hal ini berkaitan dalam Pedoman Umum Perserikatan Bangsa-Bangsa (2023) terkait perwakilan NGO, bahwa PBB mengakui pentingnya bermitra dengan masyarakat sipil untuk memajukan cita-cita bersama. Sejak diadopsinya Agenda 2030 untuk *Sustainable Development Goals* (SDGs) pada tahun 2015, peran NGO sebagai mitra PBB menjadi semakin signifikan. Oleh karena itu, diperlukan kerja sama yang lebih inklusif, menyertakan berbagai aktor non-negara dan peningkatan kerja sama dengan masyarakat sipil.

Pertumbuhan jumlah dan pengaruh NGO dalam satu dekade terakhir meningkat sebagai kontributor dalam upaya global untuk mencapai tujuan pembangunan berkelanjutan. NGO dinilai memainkan peran penting dalam memfasilitasi *bottom-up diplomacy* atau diplomasi dari bawah ke atas. Dengan memanfaatkan fleksibilitas mereka, NGO membantu mewujudkan target SDGs, terutama pada bidang-bidang seperti pendidikan berkualitas (SDG 4), kesetaraan gender (SDG 5), mengurangi kesenjangan (SDG 10), dan mengatasi krisis iklim (SDG 13). Dengan bermitra dengan pemerintah, organisasi internasional, dan sektor swasta, NGO menerapkan program dan merekomendasikan kebijakan yang

mempromosikan pembangunan berkelanjutan, yang selaras dengan *motto* SDGs bahwa tidak ada yang tertinggal.

Berdasarkan penjelasan di atas, dalam kasus kolaborasi antara Bina Antarbudaya dan *AFS Intercultural Programs*, kemitraan mereka menyoroti pentingnya NGO dalam membina hubungan diplomatik yang positif dan mewujudkan kepentingan bersama. Konsep ini akan menjelaskan mengenai Bina Antarbudaya dan *AFS Intercultural Programs* sebagai NGO yang berfokus pada pertukaran pendidikan dan pembelajaran antarbudaya, yang merupakan komponen dalam membangun hubungan diplomatik jangka panjang yang erat antara Indonesia dan AS.

1.4.3 *Soft Power*

Konsep utama dalam diplomasi kontemporer menekankan peran *soft power*, istilah yang diperkenalkan oleh Joseph Nye pada akhir era Perang Dingin. *Soft power* merupakan hal pokok dalam politik demokratis sehari-hari. Dalam pengertian yang paling mendasar, *soft power* menurut Nye (2004) adalah kemampuan yang digunakan oleh negara, organisasi, dan individu untuk membentuk persepsi, sikap, dan perilaku pihak lain tanpa menggunakan paksaan atau cara yang koersif. *Soft power* berbeda dengan *hard power* karena tidak menggunakan kekuatan koersif untuk menarik pihak lain menerima atau mengikuti preferensi yang dimiliki suatu aktor.

Nye (2004) membagi tiga aspek utama *soft power* yaitu budaya, nilai-

nilai politik, dan kebijakan luar negeri. Konsep ini berperan dalam hubungan internasional, terutama ketika negara-negara bertujuan untuk meningkatkan posisi globalnya, mengelola reputasi negara, dan mencapai tujuan diplomatik keberlanjutan. Sejalan dengan penjelasan Dr. Umar Suryadi Bakry (2017), instrumen yang dapat digunakan untuk menerapkan konsep *soft power* adalah diplomasi, distribusi informasi, analisis, propaganda, dan program-program budaya untuk tujuan-tujuan politik.

1.5 Metode Penelitian

1.5.1 Jenis Penelitian

Metode penelitian yang digunakan dalam skripsi ini bersifat kualitatif. Pendekatan ini melibatkan pengumpulan dan analisis data dan fakta untuk memberikan pemahaman mendalam mengenai topik yang diangkat. Pengumpulan data dilakukan melalui kompilasi informasi dari berbagai sumber terpilih, termasuk artikel, jurnal, buku, studi kasus yang relevan, dan sumber *online* yang kredibel seperti *official website* Bina Antarbudaya dan *AFS Intercultural Programs*. Penelitian ini juga melakukan wawancara langsung dengan aktor yang terlibat di lapangan. Fokus dari metode ini adalah menjelaskan dan menganalisis peran dan dampak kedua NGO tersebut terhadap kerja sama pendidikan Indonesia dan AS.

1.5.2 Jenis Data

a) Data Primer

Data primer merupakan data yang langsung dikumpulkan dari sumber informan melalui wawancara. Penelitian ini memilih narasumber yang berpengalaman dan memahami jelas terkait organisasi Bina Antarbudaya dan *AFS Intercultural* untuk membantu proses penelitian ini.

b) Data Sekunder

Data sekunder merupakan data yang telah dikumpulkan, dianalisis, dan dipublikasikan oleh peneliti, organisasi, atau lembaga lain. Tidak seperti data primer yang dikumpulkan secara langsung. Data sekunder yang digunakan dalam penelitian ini berupa data-data yang berhubungan dengan Bina Antarbudaya, *AFS Intercultural*, dan kerja sama bidang pendidikan Indonesia dan AS, seperti jurnal dan artikel akademik, buku, laporan dan publikasi; serta website dan sosial media resmi Bina Antarbudaya dan *AFS Intercultural Programs*.

1.5.3 Teknik Pengumpulan Data

Teknik pengumpulan data yang digunakan oleh peneliti dalam penelitian ini, sebagai berikut:

1. Studi literatur atau studi kepustakaan, dengan metode ini peneliti mengumpulkan dan menganalisis informasi dari data sekunder yang terkumpul. Sumber yang digunakan dalam metode ini adalah jurnal akademik, laporan dan publikasi,

buku, dan penelitian terdahulu terkait topik terkait.

2. Penelitian ini mengumpulkan informasi mendalam tentang Bina Antarbudaya dan *AFS Intercultural*, terkait keterlibatan mereka, peran, strategi, pengalaman alumni, dan dampaknya. Wawancara dilakukan pada tanggal 15 April 2025 di Kantor Nasional Bina Antarbudaya di Jakarta. Informan yang terlibat dalam penelitian ini:

1. Kak Gatot Nuradi Sam (*Executive Director* Bina Antarbudaya)
2. Kak Sari Tjakrawiralaksana (*Program Coordinator* Bina Antarbudaya)
3. Kak Farhan Hibatullah (*Volunteer Development Coordinator* Bina Antarbudaya)
4. Kak Fika Farhanah (*Co-Coordinator Volunteer Development* Bina Antarbudaya)

1.5.4 Teknik Analisis Data

Dalam tahapan ini peneliti melakukan analisis kualitatif untuk memahami topik penelitian secara mendalam. Metode ini berfokus pada menginterpretasi dan menganalisis data primer dan data sekunder yang telah dikumpulkan. Proses ini menyusun data secara sistematis dari wawancara, studi literatur, dan materi relevan lainnya, kemudian merangkainya menjadi paragraf dan kalimat sistematis. Dengan

menyajikan hasil analisis yang terstruktur dan naratif, metode ini memberikan pemahaman menyeluruh tentang topik yang diangkat.

1.6 Tahapan Penelitian

Setelah data dikumpulkan dan dianalisis, penelitian ini disusun secara terstruktur dalam lima bab, berikut uraiannya:

Bab 1, pendahuluan, memberikan gambaran umum tentang topik penelitian dengan menguraikan kerja sama yang telah terjalin antara Indonesia dan Amerika Serikat dalam bidang pendidikan, peran Bina Antarbudaya mitra *AFS Intercultural Programs* sebagai NGO terhadap kerja sama pendidikan Indonesia dan Amerika Serikat. Bab ini menjelaskan alasan mengapa topik ini dipilih oleh peneliti, menguraikan ruang lingkup penelitian, pertanyaan penelitian, tujuan dan manfaat penelitian, kerangka konseptual, dan membahas metodologi penelitian kualitatif yang digunakan. Bab ini menjadi dasar untuk memberikan pemahaman yang jelas tentang konteks penelitian.

Bab 2, tinjauan pustaka, memberikan gambaran teoritis yang digunakan seperti konsep diplomasi publik, konsep organisasi non-pemerintah, dan konsep kekuatan lunak atau soft power. Bab ini juga mengkaji literatur yang relevan, dengan fokus bagaimana NGO dan program tersebut berkontribusi untuk membentuk opini publik, membangun pemahaman antarbudaya, toleransi, dan meningkatkan kerja sama internasional.

Bab 3, gambaran umum, memberikan gambaran umum terkait profil

lengkap Bina Antarbudaya dan *AFS Intercultural Programs*. Bab ini mencakup sejarah Bina Antarbudaya dan *AFS Intercultural Programs*, misi kedua organisasi, dan berbagai program yang dijalankan, khususnya program antara Indonesia dan AS. Selain itu, bab ini juga mengeksplorasi terkait metode pembelajaran antarbudaya yang menjadi aspek utama dalam program-program pertukaran pelajar.

Bab 4, hasil penelitian, menyajikan temuan analisis data kualitatif yang diperoleh melalui wawancara, studi literatur, dan sumber relevan lainnya. Bab ini menguraikan bagaimana Bina Antarbudaya dan AFS Intercultural Programs berperan sebagai aktor non-negara dalam memfasilitasi kerja sama pendidikan antara Indonesia dan Amerika Serikat melalui program pertukaran pelajar. Bab ini membahas transformasi AFS sebagai instrumen diplomasi publik, strategi pendekatan dan tanggung jawab kelembagaan Bina Antarbudaya, serta kontribusi program seperti KL-YES dalam membentuk persepsi positif, pemahaman antarbudaya, dan hubungan antar masyarakat. Pengalaman alumni program juga dianalisis sebagai refleksi keberhasilan diplomasi publik melalui pendidikan dan pertukaran budaya.

Bab 5, kesimpulan dan saran, merangkum hasil penelitian terkait kontribusi yang diberikan oleh Bina Antarbudaya mitra AFS Intercultural Programs sebagai NGO dalam kerja sama pendidikan Indonesia dan Amerika Serikat. Sementara itu, bagian saran memberikan rekomendasi untuk meningkatkan efektivitas program, termasuk perlunya kerja sama lebih intensif antara NGO dan pemerintah, serta perlunya riset lanjut mengenai peran NGO

dalam diplomasi pendidikan. Bab ini menutup penelitian dengan menyoroti pentingnya kolaborasi lintas sektor demi memperkuat hubungan bilateral melalui jalur pendidikan.

BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

2.1 Penelitian Terdahulu

Penelitian yang berjudul “Diplomasi Publik Amerika Serikat Melalui Program *The Kennedy-Lugar Youth Exchange and Study* (YES) ke Indonesia Pasca Peristiwa 9/11 Periode Tahun 2003-2013” ditulis oleh Zuma Qoyuma mengkaji konsep diplomasi publik sebagai instrumen dalam membangun dan memperkuat hubungan antara AS dan Indonesia, khususnya pasca peristiwa 9/11. Studi ini menyoroti bagaimana program pertukaran pelajar yang diinisiasi oleh Departemen Luar Negeri AS menjadi salah satu strategi utama dalam menjangkau masyarakat Muslim, termasuk Indonesia, melalui jalur pendidikan dan pertukaran budaya.

Qoyuma menjelaskan bahwa terdapat tiga aspek yang diterapkan dalam diplomasi publik AS ke Indonesia, meliputi *daily communications*, *strategic communications*, dan *development of lasting relationship*. Dari ketiga aspek tersebut, penelitian ini berfokus pada aspek *development of lasting relationship* yang mengutamakan pembentukan *mutual understanding* kedua negara melalui para peserta pertukaran pelajar dari Indonesia yang datang ke AS.

Alasan penulis memilih penelitian Zuma Qoyuma sebagai acuan yang relevan dalam dengan penelitian ini adalah kesamaan topik yang membahas mengenai AS sebagai inisiator program pertukaran pendidikan

YES dengan negara target Indonesia. Penelitian Qoyuma dan penelitian penulis mengkaji tentang program pertukaran pelajar sebagai instrumen diplomasi publik AS untuk memperkuat hubungan antarmasyarakat melalui *soft power*.

Kemudian, terdapat perbedaan pada penelitian Qoyuma dengan penulis, terletak pada aktor utama. Aktor utama dalam penelitian penulis adalah NGO yang berperan sebagai administrator pelaksana program yaitu Bina Antarbudaya dan *AFS Intercultural Programs*. Sedangkan, aktor utama dalam penelitian Qoyuma adalah pemerintah AS (Departemen Luar Negeri) yang menginisiasikan *YES Program* tersebut. Selanjutnya fokus penelitian penulis adalah bagaimana peran NGO dalam pertukaran pelajar dan diplomasi pendidikan. Sedangkan penelitian Qoyuma hanya berfokus pada bagaimana program pertukaran sebagai alat diplomasi publik AS.

Selanjutnya, penelitian kedua yang menjadi acuan dalam kajian ini adalah disertasi berjudul “*The Fulbright Program and American Public Diplomacy*”, yang ditulis oleh Molly Lenore Bettie. Disertasi ini mengkaji program pertukaran pendidikan Fulbright sebagai salah satu bentuk diplomasi publik AS yang dijalankan dengan tujuan untuk mempererat hubungan antarnegara melalui kerja sama di bidang pendidikan. Penelitian ini memahami bagaimana program pertukaran mendukung kebijakan luar negeri AS, serta bagaimana persepsi terhadap negara tuan rumah dapat terbentuk melalui interaksi antarbudaya. Penelitian ini menunjukkan bahwa keberhasilan program pertukaran pendidikan tidak hanya

bergantung pada dukungan pemerintah, tetapi juga pada desain program yang mampu menciptakan interaksi bermakna antara peserta dari latar belakang budaya yang berbeda.

Alasan penulis memilih disertasi Molly Lenore Bettie adalah penelitian terhadap program *Fulbright* menjadi relevan sebagai pembanding untuk menganalisis kontribusi Bina Antarbudaya dan *AFS Intercultural Programs* sebagai NGO yang juga bergerak dalam bidang pertukaran pelajar, keduanya memiliki tujuan serupa dalam membangun pemahaman antarbudaya dan memperkuat kerja sama pendidikan internasional.

Kemudian, perbedaan antara disertasi Bettie dan penelitian penulis terletak pada fokus institusional yang mana dalam disertasi Bettie mengkaji program yang dikelola pemerintah (*Fulbright*). Sedangkan dalam penelitian penulis berfokus pada program yang dikelola oleh NGO, meskipun program tersebut atas inisiasi pemerintah AS. Selain itu pada ruang lingkup geografis penulis berfokus pada kerja sama pendidikan khususnya Indonesia dan AS. Ruang lingkup penelitian Bettie berpusat pada AS dengan kemitraan *Fulbright* secara global.

Penelitian lain yang menjadi acuan adalah artikel jurnal berjudul “*The Impact of Japan’s Cultural Diplomacy Towards Indonesia: The Case Study of Asia Kakehashi Program*” oleh Paola Martha Adithya Putri dan Riski M.. Penelitian ini mengkaji strategi diplomasi budaya Jepang terhadap Indonesia, yaitu *Asia Kakehashi Program* yang bertujuan untuk

menjadi jembatan pertukaran budaya antara Indonesia dan Jepang untuk mencapai *mutual understanding* antar kedua negara. Aktor negara dan aktor non-negara berperan aktif selama pelaksanaan program.

Dalam hal ini Kementrian Pendidikan, Kebudayaan, Olahraga, Ilmu Pengetahuan, dan Teknologi (*MEXT*) di Jepang merupakan inisiator utama dalam pembentukan dan sponsor utama dalam program pertukaran pelajar ini. Aktor non-negara yang berperan dalam inisiatif ini adalah AFS Jepang sebagai mitra resmi *AFS Intercultural Programs*. Penulis mengatakan bahwa program *Asia Kakehashi* adalah contoh dari strategi diplomasi budaya Jepang yang berhasil dilaksanakan terhadap Indonesia dibuktikan dengan tercapainya *mutual understanding* antarmasyarakat Indonesia dan Jepang yang menjadi tujuan utama program ini.

Alasan penulis memilih artikel jurnal ini sebagai studi pembandingan adalah, penelitian ini menggunakan *AFS Intercultural Programs* sebagai mitra pelaksana program, seperti objek penelitian penulis. Dengan menerapkan teori *soft power* yang sejalan dengan penelitian penulis. Penelitian ini menunjukkan bagaimana program pertukaran pelajar suatu negara berfungsi sebagai alat untuk membentuk citra dan menumbuhkan *mutual understanding* antar negara.

Kemudian, perbedaan antara artikel jurnal Paola Martha Adithya Putri dan Riski M. dan penelitian penulis terletak pada aktornya. Dalam artikel jurnal ini, aktor yang diteliti adalah pemerintah Jepang (*MEXT*) dan AFS Jepang sebagai NGO. Sedangkan dalam penelitian penulis, aktor yang

dikaji adalah Bina Antarbudaya dan *AFS Intercultural Programs*. Selanjutnya pada aspek arah diplomasi, pada artikel jurnal ini berfokus pada arah diplomasi Jepang terhadap Indonesia. Sedangkan, penelitian penulis berfokus pada arah diplomasi AS terhadap Indonesia melalui NGO.

Penulis	Judul	Fokus	Perbedaan
Zuma Qoyuma	Diplomasi Publik Amerika Serikat Melalui Program <i>The Kennedy-Lugar Youth Exchange and Study</i> (YES) ke Indonesia Pasca Peristiwa 9/11 Periode Tahun 2003-2013	Mengkaji konsep diplomasi publik sebagai instrumen dalam membangun dan memperkuat hubungan antara AS dan Indonesia, khususnya pasca peristiwa 9/11. Studi ini menyoroti bagaimana program pertukaran pelajar yang diinisiasi oleh Departemen Luar Negeri AS menjadi salah satu strategi utama dalam menjangkau	- Aktor utama dalam penelitian penulis adalah NGO Bina Antarbudaya dan AFS Intercultural Programs. Sedangkan, aktor utama dalam penelitian Qoyuma adalah pemerintah AS yaitu Departemen Luar Negeri. - Fokus penelitian penulis adalah peran NGO dalam diplomasi publik dan pendidikan. Sedangkan penelitian Qoyuma berfokus pada bagaimana program pertukaran sebagai alat diplomasi publik AS.

		masyarakat Muslim, termasuk Indonesia, melalui jalur pendidikan dan pertukaran budaya.	
Molly Lenore Bettie	<i>The Fulbright Program and American Public Diplomacy</i>	Mengkaji program pertukaran pendidikan Fulbright sebagai salah satu bentuk diplomasi publik AS yang dijalankan dengan tujuan untuk memperkuat hubungan antarnegara melalui kerja sama di bidang pendidikan.	- Fokus institusional dalam disertasi Bettie mengkaji program yang dikelola pemerintah (Fulbright). Sedangkan dalam penelitian penulis berfokus pada program yang dikelola oleh NGO, meskipun program tersebut atas inisiasi pemerintah AS. - Ruang lingkup geografis penulis berfokus pada kerja sama pendidikan khususnya Indonesia dan AS. Ruang lingkup penelitian Bettie berpusat pada AS dengan kemitraan Fulbright secara global.
Paola Martha Adithya Putri	<i>The Impact of Japan's Cultural Diplomacy Towards</i>	Mengkaji strategi diplomasi budaya Jepang terhadap Indonesia, yaitu Asia Kakehashi	- Aktor yang diteliti dalam penelitian jurnal ini adalah pemerintah Jepang (MEXT) dan AFS Jepang sebagai NGO. Sedangkan dalam penelitian

dan Riski M	<i>Indonesia: The Case Study of Asia Kakehashi Program</i>	Program yang bertujuan untuk menjadi jembatan pertukaran budaya antara Indonesia dan Jepang untuk mencapai mutual understanding antar kedua negara. Aktor negara dan aktor non-negara berperan aktif selama pelaksanaan program.	penulis, aktor yang dikaji adalah Bina Antarbudaya dan AFS Intercultural Programs. - Aspek arah diplomasi, pada jurnal ini berfokus pada arah diplomasi Jepang terhadap Indonesia. Sedangkan, penelitian penulis berfokus pada arah diplomasi AS terhadap Indonesia melalui NGO.
----------------	--	--	---

2.2 Diplomasi Publik

Diplomasi secara umum berkaitan dengan pengelolaan hubungan antar negara dan negara dengan aktor lainnya. Barston (2013) dalam buku yang berjudul “*Modern Diplomacy (4th ed)*” mengatakan bahwa dari perspektif negara, diplomasi berkaitan dengan menyarankan, membentuk, dan melaksanakan kebijakan luar negeri. Dengan demikian, ini adalah cara di mana negara-negara melalui perwakilan resmi, serta aktor lainnya, mengekspresikan, mengoordinasikan, dan mengejar kepentingan tertentu atau lebih luas. Hal ini dilakukan melalui berbagai model komunikasi tertulis, diskusi pribadi, negosiasi, lobi, kunjungan, ancaman, dan tindakan

terkait lainnya.

Umumnya diplomasi dikaitkan dengan proses damai, diplomasi juga dapat terjadi selama masa perang atau konflik, bahkan dapat mendukung tindakan kekerasan. Contohnya seperti mengatur jalur penerbangan untuk serangan militer. Perpaduan metode diplomasi damai dan agresif adalah sesuatu yang membedakan diplomasi kontemporer dan diplomasi tradisional. Selain itu, menurut James Baker mantan Menteri Luar Negeri AS, ruang lingkup diplomasi telah berkembang, dengan istilah baru seperti “*oil diplomacy*”, “*resource diplomacy*”, “*knowledge diplomacy*”, “*global governance*”, dan “*transition diplomacy*” menggambarkan bagaimana hubungan internasional yang lebih kompleks.

Diplomasi tidak lagi terbatas pada masalah politik atau strategis tradisional, praktiknya juga tidak terbatas pada diplomat formal atau staf kementerian luar negeri. Sebaliknya, diplomasi melibatkan beragam kelompok aktor, termasuk diplomat politik, penasihat, perwakilan khusus, dan pejabat dari berbagai kementerian atau lembaga domestik. Praktik ini juga mencakup organisasi internasional seperti *International Monetary Fund* (IMF), *United Nations* (PBB), atau melibatkan perusahaan asing yang bekerja dengan pemerintah, bahkan *Non-Governmental Organization* (NGO). Aktor yang beragam ini berkontribusi pada bentuk diplomasi yang lebih teknis dan transnasional (Barston, 2013).

Dalam konteks yang lebih luas, diplomasi publik muncul sebagai perpanjangan tangan dari diplomasi tradisional. Edmund Gullion (1965)

pertama kali mendefinisikan diplomasi publik sebagai upaya pemerintah, organisasi swasta, dan individu untuk mempengaruhi opini publik di negara lain guna membentuk kebijakan luar negeri. Fokus diplomasi publik tidak hanya terpaku pada interaksi antar pemerintah (*Government-to-Government*), tetapi melibatkan komunikasi antarbudaya dan partisipasi masyarakat sipil, menjadikannya strategi bersifat multidimensi dan inklusif.

Konsep bahwa hanya negara yang dapat menjadi aktor diplomasi publik telah ditantang sejak lama dengan diperkenalkannya “*New Public Diplomacy*” (NPD). Jan Melissen (2005) telah memperluas jangkauan definisi diplomasi publik untuk mencakup aktivitas yang dilakukan oleh aktor swasta, non-negara. Diplomasi publik baru mencakup berbagai jenis keterlibatan antara publik lintas batas, seperti aktivitas yang dilakukan oleh organisasi non-pemerintah.

U.S. Department of State (1987) mendefinisikan diplomasi publik sebagai program yang disponsori pemerintah untuk menginformasikan atau mempengaruhi opini publik di negara lain. Alat utamanya adalah publikasi, film, pertukaran budaya, radio, dan televisi. Sementara itu, Michael Waller (2007) memandang diplomasi publik tidak hanya sebagai alat idealis untuk membangun “*mutual understanding*”, tetapi juga sebagai instrumen kebijakan luar negeri yang kuat dalam mempengaruhi sikap masyarakat global dan pemerintah asing.

Perspektif lain dari Paul A. Smith (1989), diplomasi publik adalah

bentuk advokasi politik internasional yang diarahkan secara terbuka oleh warga sipil kepada berbagai audiens, tetapi pada umumnya untuk mendukung negosiasi melalui saluran diplomatik. Ini terutama menargetkan masyarakat umum dan menggunakan metode advokasi yang dapat diterima oleh pemerintah tuan rumah. Tujuannya adalah untuk mendapatkan dukungan publik untuk solusi yang saling menguntungkan tanpa bergantung pada ancaman, tekanan, atau paksaan.

Seiring perkembangan zaman, konsep diplomasi publik mengalami redefinisi yang lebih interaktif. Nicholas J. Cull (2009) mengatakan bahwa diplomasi publik modern tidak lagi sekedar alat propaganda negara, tetapi berkembang menjadi komunikasi dua arah yang memungkinkan pertukaran ide dan pemahaman antar masyarakat. Berbeda dengan model komunikasi satu arah yang dominan pada era Perang Dingin, diplomasi publik saat ini lebih menitikberatkan pada kolaborasi dan hubungan jangka panjang. Contohnya, program pertukaran pelajar yang mempertemukan siswa dari berbagai negara tidak hanya menjadi sarana berbagai informasi, tetapi juga membangun pemahaman lintas budaya yang dapat mempengaruhi opini publik secara organik.

Dalam kajian diplomasi publik, Nicholas J. Cull (2009) mengidentifikasi beberapa pendekatan inti yang mencerminkan sifat multidimensional diplomasi publik sebagai alat kebijakan luar negeri, dalam buku Nicholas yang berjudul *“Public Diplomacy: Lessons from the Past”*, sebagai berikut:

1. Mendengarkan (*Listening*)

Mendengarkan adalah langkah pertama dalam diplomasi publik, karena memungkinkan para aktor internasional untuk mengumpulkan dan menganalisis opini publik asing untuk menyesuaikan kebijakan dan strategi diplomatik yang sesuai.

2. Advokasi (*Advocacy*)

Advokasi dalam diplomasi publik melibatkan promosi kebijakan, ide, atau kepentingan nasional secara efektif kepada publik asing melalui hubungan pers dan kampanye informasi.

3. Diplomasi Kebudayaan (*Cultural Diplomacy*)

Diplomasi budaya melibatkan promosi budaya suatu negara di luar negeri dan mendukung pertukaran budaya. Contohnya, Prancis yang berinvestasi dalam diplomasi budaya, menggunakan pendidikan untuk memperkuat pengaruh global dan kehadiran bahasanya.

4. Diplomasi Pertukaran (*Exchange Diplomacy*)

Diplomasi pertukaran melibatkan pengiriman dan penerimaan warga negara untuk belajar dan mendalami budaya, yang mendorong saling pengertian antar negara. Beberapa pihak melihatnya sebagai promosi satu arah nilai-nilai nasional yang mendukung gagasan pembelajaran dan transformasi bersama.

5. Penyiaran Berita Internasional (*Broadcasting*)

Penyiaran menggunakan radio, televisi, dan internet untuk melibatkan publik asing. Penyiaran internasional dapat didanai negara atau komersial, dengan keduanya mempengaruhi diplomasi publik global. Penyiaran internasional terhubung dengan aktivitas diplomasi publik lainnya, seperti memantau opini global (mendengarkan), mempromosikan kebijakan (advokasi), dan berbagi konten budaya.

6. Perang Psikologis (*Psychological Warfare*)

Perang psikologis tetap menjadi instrumen komunikasi strategis dalam situasi konflik, bertujuan melemahkan moral lawan melalui propaganda terbuka maupun terselubung. Pendekatan ini menunjukkan bahwa diplomasi publik bukan sekedar alat komunikasi satu arah, melainkan strategi kompleks yang mengintegrasikan berbagai elemen untuk mencapai tujuan kebijakan luar negeri secara lebih efektif.

Sedangkan akademisi seperti Jan Melissen (2005) memperkenalkan konsep *New Public Diplomacy* (NPD) atau diplomasi publik yang lebih terbuka, interaktif, dan berfokus pada pembangunan hubungan jangka panjang. Konsep NPD menekankan komunikasi dua arah yang melibatkan berbagai aktor, termasuk NGO, individu, dan institusi non-negara. Pendekatan ini bukan sekedar alat kebijakan luar negeri, tetapi juga sarana membangun kepercayaan dan memperkuat hubungan antar-masyarakat

lintas negara. Dalam perspektif ini, diplomasi publik tidak hanya berorientasi pada politik, tetapi juga pada keterhubungan sosial, kolaborasi ide, serta kepentingan bersama antarbangsa.

Selain itu, diplomasi publik dapat dianalisis melalui model komunikasi James Carey (1989) yang memandang komunikasi sebagai proses yang membantu membentuk dan mempertahankan identitas suatu bangsa. Analisis tersebut, menjelaskan bahwa diplomasi publik tidak hanya sebagai sarana penyampaian informasi, tetapi sebagai penguatan nilai-nilai, narasi, dan persepsi nasional dalam interaksi internasional. Dengan demikian, diplomasi publik dapat digunakan secara strategis untuk menyesuaikan citra global suatu negara agar sejalan dengan kepentingan kebijakan luar negeri.

Misalnya, negara-negara sering kali mengandalkan program budaya, pertukaran pendidikan, dan penyiaran internasional sebagai instrumen utama untuk memperkuat citra nasional serta meningkatkan pengaruh mereka dalam hubungan internasional. Hal ini menunjukkan bahwa diplomasi publik modern bukan sekedar instrumen komunikasi, tetapi juga alat yang efektif dalam membentuk opini global dan memperkuat posisi negara dalam tatanan dunia.

Definisi lain diplomasi publik menurut Edward R. Murrow (1965) jurnalis Amerika, berpendapat bahwa diplomasi publik berhubungan dengan pengaruh sikap publik terhadap pembentukan dan pelaksanaan kebijakan luar negeri. Hal ini mencakup proses pemerintah membentuk

dan mempengaruhi sikap publik di negara lain; interaksi kelompok dan kepentingan swasta di satu negara dengan negara lain; pelaporan urusan kebijakan luar negeri dan dampaknya terhadap kebijakan; interaksi antara profesional seperti diplomat dan jurnalis; dan proses komunikasi antarbudaya.

Inti dari diplomasi publik adalah aliran informasi dan gagasan transnasional. Sebagai contoh, beragam komunikasi yang digunakan AS untuk mempengaruhi persepsi publik secara global. Strategi ini meliputi kontak personal, penyiaran radio, distribusi buku, liputan pers, film, televisi, pameran, dan pendidikan bahasa Inggris. AS mengadaptasi strategi kebijakan luar negerinya berdasarkan kebutuhan masing-masing negara, dengan memastikan bahwa upaya diplomatiknya sejalan dengan kepentingan nasionalnya.

Perspektif lain dari *U.S. Department of State* (2007), diplomasi publik berfokus pada upaya menjadikan kebijakan luar negeri AS lebih transparan dan mudah diakses oleh khalayak global dengan menyampaikan perspektif, nilai, dan kebijakan negara secara efektif. Diplomasi publik berfungsi sebagai jembatan antara masyarakat AS dan komunitas internasional, dengan menekankan kepentingan dan nilai-nilai bersama. Diplomasi publik juga ditujukan melalui inisiatif praktis, seperti investasi dalam pendidikan, perawatan kesehatan, dan peluang ekonomi, yang membantu mendorong partisipasi sosial yang lebih besar di seluruh dunia.

Sejak berakhirnya Perang Dingin, AS telah mengandalkan diplomasi publik sebagai komponen utama kebijakan luar negerinya. Setelah serangan 9/11, diplomasi publik menjadi instrumen dalam kerangka kebijakan luar negeri AS, yang mengarah pada terciptanya inisiatif yang didanai oleh pemerintah yang bertujuan untuk menginformasikan, melibatkan, dan mempengaruhi khalayak asing tentang nilai-nilai dan kepentingan AS. Selama pemerintahan Obama, penekanan signifikan diberikan pada peningkatan strategi komunikasi AS untuk meningkatkan citra globalnya.

Salah satu strategi diplomasi publik pasca 9/11 yang paling terkenal adalah *National Strategy for Public Diplomacy and Strategic Communication* (NSPDSC) 2007, yang dikembangkan dibawah Wakil Menteri untuk Diplomasi Publik dan Urusan Publik, Karen Hughes. Pemerintah AS berupaya bermitra dengan bangsa dan masyarakat di seluruh dunia dengan cara yang damai dan inklusif. AS berupaya menjadi mitra untuk kemajuan, kemakmuran, dan perdamaian di seluruh dunia. Berikut tiga tujuan strategis untuk mengatur diplomasi publik dan komunikasi strategis Amerika dengan khalayak global:

1. Mempromosikan visi positif AS, menekankan nilai-nilai seperti kebebasan, keadilan, dan kesempatan, untuk ditawarkan kepada publik asing.
2. Melawan ekstremisme dengan melemahkan narasi ekstremis dan memperkuat pendirian AS bahwa AS tidak bertentangan

dengan agama apa pun, tetapi justru menjunjung tinggi kebebasan beragama.

3. Berupaya dalam memelihara kepentingan dan nilai-nilai bersama antara warga Amerika dan masyarakat dari berbagai negara, budaya, dan agama di seluruh dunia.

Upaya diplomasi publik dan komunikasi strategis AS mempertimbangkan karakteristik demografi dari berbagai masyarakat. Salah satu prioritas utama diplomasi publik AS adalah kaum muda, dengan memanfaatkan program pendidikan dan pertukaran serta internet untuk menjangkau audiens ini. Untuk mencapai misi dari NSPDSC tersebut, pemerintah AS menetapkan prioritas program pendidikan dan pertukaran sebagai komponen penting dari upaya diplomasi publiknya.

Program pertukaran pendidikan merupakan alat diplomasi publik yang efektif dalam lima puluh tahun terakhir. Inisiatif ini menargetkan para pemuda dan kelompok berpengaruh di masyarakat. Untuk meningkatkan upaya ini, lembaga publik didorong untuk berkolaborasi dengan sektor swasta dan organisasi masyarakat sipil untuk memperluas akses dan meningkatkan dampak pertukaran ini. Sejalan dengan itu, lembaga dan kedutaan harus bermitra dengan pihak-pihak yang memiliki kepentingan bersama dalam mendorong kesuksesan program ini.

Khususnya, program-program seperti *Kennedy Lugar Youth Exchange Study* (KL-YES) dan *YES Abroad*, mewakili saluran utama diplomasi publik AS, terutama dalam memperkuat hubungan dengan

negara-negara mayoritas Muslim. Inisiatif ini mewujudkan nilai-nilai inti diplomasi publik AS, bahwa kebebasan, demokrasi, dan saling pengertian adalah hal mendasar untuk mencapai perdamaian global yang berkelanjutan. Dalam konteks ini, lembaga yang berbasis di Indonesia seperti Bina Antarbudaya, dalam kemitraan dengan AFS Intercultural Programs di Amerika, berfungsi sebagai aktor non-negara yang vital dengan memfasilitasi diplomasi *people-to-people* melalui program pertukaran pemuda.

Dengan melibatkan individu muda dalam pengalaman belajar antarbudaya yang imersif, Bina Antarbudaya dan AFS membantu menumbuhkan *active global citizenship* dan hubungan transnasional yang berkelanjutan. Program-program ini melampaui mekanisme diplomatik formal, menggambarkan bagaimana organisasi non-pemerintah berkontribusi secara signifikan terhadap realisasi tujuan kebijakan luar negeri melalui soft power dan diplomasi pendidikan. Kemitraan yang terbentuk melalui pertukaran ini mencerminkan kerangka kerja multidimensi diplomasi publik yang diartikulasikan oleh Nicholas J. Cull (2009), yang mencakup elemen-elemen seperti mendengarkan, advokasi, diplomasi budaya, diplomasi pertukaran, penyiaran internasional, dan psychology warfare.

Selain itu, inisiatif ini mencerminkan dimensi ketiga diplomasi publik seperti yang dikonseptualisasikan oleh Leonard, Stead, dan Smewing (2002), yang menekankan pentingnya membangun hubungan jangka

panjang dengan individu-individu melalui seminar, beasiswa, dan konferensi. Tidak seperti diplomasi tradisional yang berpusat pada *top-down communication*, dimensi ini menekankan keterlibatan *people-to-people*, yang menggarisbawahi hubungan yang bermakna antara masyarakat. Ini mencontohkan bagaimana negara dapat memanfaatkan kekuatan masyarakat sipil untuk memperkuat hubungan bilateral berkelanjutan di tingkat akar rumput.

Berdasarkan penjelasan di atas, penelitian ini bertujuan untuk menjawab pertanyaan: bagaimana peran Bina Antarbudaya mitra *AFS Intercultural Programs* dalam memfasilitasi diplomasi publik antara Indonesia dan AS melalui program pertukaran pelajar. Kolaborasi ini menjadi contoh lapangan bagaimana diplomasi publik, melalui program pertukaran pendidikan dan *mutual understanding*, menumbuhkan pemahaman yang lebih dalam dan hubungan yang lebih kuat antar negara. Dengan melibatkan aktor pemerintah dan non-pemerintah, upaya ini membentuk kembali persepsi dan mempromosikan nilai-nilai toleransi, pembelajaran antarbudaya, dan kerja sama global.

Inisiatif ini sejalan dengan tujuan *Sustainable Development Goals* (SDGs), seperti pada SDGs 4 yaitu pendidikan berkualitas, SDG 10 mengurangi ketidaksetaraan, dan SDG 16 perdamaian; keadilan; dan lembaga yang kuat. Melalui komitmen mereka terhadap pendidikan yang inklusif, adil, dan dialog antarbudaya, Bina Antarbudaya dan *AFS Intercultural Programs* membantu mempromosikan pendidikan yang

inklusif dan merata, menciptakan *global active citizenships*, dan meningkatkan *mutual understanding* untuk berkontribusi pada dunia yang lebih adil.

Dalam konteks pembahasan ini, diplomasi publik pada intinya adalah tentang mempublikasikan diplomasi Amerika dan mengomunikasikan perspektif, nilai, dan kebijakan Amerika secara efektif kepada khalayak global. Diplomasi publik mendorong hubungan antara rakyat Amerika dan seluruh dunia dengan menjunjung tinggi akan kepentingan dan nilai-nilai bersama. Dengan berinvestasi pada masyarakat muda melalui pertukaran pendidikan, diplomasi publik berupaya mewujudkan kondisi yang mengarah pada perdamaian dunia.

2.3 *Non-Governmental Organization (NGO)*

Non-Governmental Organization (NGO) atau Organisasi Non-Pemerintah adalah entitas independen yang berperan dalam mengatasi isu sosial, ekonomi, politik, dan lingkungan, baik dalam skala lokal maupun global. Dalam kerangka *multitrack diplomacy*, NGO diposisikan sebagai aktor *Track II*, melengkapi diplomasi negara resmi (*Track I*) melalui intervensi informal, fleksibel, pada tingkat akar rumput. Konsep “*Track Two Diplomacy*” diperkenalkan oleh Joseph Montville dan William Davidson pada tahun 1981 untuk menggambarkan pertukaran tidak resmi dan tidak terstruktur antara aktor non-negara, seperti akademisi atau organisasi masyarakat sipil, sebagai sarana untuk menyelesaikan konflik

di luar jalur resmi.

Gagasan tersebut kemudian diperluas pada tahun 1990-an oleh Diamond dan McDonald melalui model “*Multitrack Diplomacy*”, yang mengidentifikasi sembilan jalur yang saling berhubungan termasuk masyarakat sipil, bisnis, media, dan lembaga keagamaan, yang bersama-sama berkontribusi pada perdamaian yang berkelanjutan. Sebagai bagian dari *multitrack diplomacy*, NGO melengkapi jalur diplomasi resmi dengan memfasilitasi dialog, pembangunan, dan perdamaian. Keunggulan utama NGO terletak pada kemampuannya untuk beroperasi secara independen, memobilisasi sumber daya, serta mendorong kolaborasi lintas sektor. Hal ini menjadikan NGO sebagai instrumen krusial dalam mengatasi tantangan global yang kompleks, seperti resolusi konflik, diplomasi kemanusiaan, dan pembangunan berkelanjutan.

Dalam konteks diplomasi publik, NGO berperan sebagai aktor non-negara yang menjembatani kesenjangan antara pemerintah, komunitas, dan organisasi internasional. Keterlibatan NGO dalam diplomasi publik menunjukkan fleksibilitas dan kemampuan mereka dalam membangun kepercayaan serta menjalin komunikasi yang lebih partisipatif dengan masyarakat sipil lintas negara. Peran ini sejalan dengan pendekatan *Multitrack Diplomacy* yang dijelaskan sebelumnya, khususnya pada *Track Four* (diplomasi akar rumput) dan *Track Five* (diplomasi akademik), di mana NGO berkontribusi dalam menciptakan ruang dialog, pertukaran pengetahuan, serta kerja sama lintas budaya.

Melalui program-program seperti pertukaran pelajar, pendidikan global, dan pembelajaran antarbudaya, NGO turut mendukung pelaksanaan diplomasi pendidikan sebagai manifestasi dari *soft power* suatu negara. Inisiatif ini tidak hanya mengurangi stereotip dan prasangka antarkelompok, tetapi juga mendorong terciptanya *mutual understanding* yang menjadi dasar dalam membangun perdamaian dan kerja sama jangka panjang. Dengan demikian, NGO tidak hanya berfungsi sebagai pelengkap dalam kebijakan luar negeri suatu negara, tetapi dapat berperan sebagai mitra strategis dalam membangun hubungan internasional yang lebih inklusif dan berkelanjutan.

Para akademisi seperti Etzioni (1973); Anheier & Seibel (1990); Korten (1990); dan Tvedt (1998) mengemukakan berbagai konsep yang memberikan kerangka analitis untuk memahami keberagaman bentuk, fungsi, dan peran organisasi non-pemerintah dalam masyarakat. Berdasarkan pendekatan mereka, NGO dapat dikategorikan ke dalam sejumlah jenis berdasarkan karakteristik struktural, orientasi tujuan, serta sumber legitimasi dan dukungan yang dimiliki. Beberapa klasifikasi yang sering digunakan dalam literatur akademik meliputi:

1. *Non-Profit Organization* (NPO)
2. *Public Voluntary Organization* (PVO)
3. *Membership Organization* (MO)
4. *Grassroots Organization* (GRO)
5. *People's Organization* (PO)

6. *Civil Society Organization* (CSO)
7. *Third Sector Organization* (TSO)
8. *Non-Governmental Development Organization* (NGDO)
9. *Charitable Organization* (CO), *Community Based Organization* (CBO)
10. *Private Organization* (PO)
11. *Public Service Contractor* (PSC)
12. *Non-Governmental Institution* (NGI)
13. *Quasi-Non-Governmental Organization* (QUANGO)

Klasifikasi ini mencerminkan variasi yang signifikan dalam cara NGO beroperasi, mulai dari organisasi yang sepenuhnya independen dan berbasis pada partisipasi sukarela masyarakat, hingga yang memiliki hubungan institusional dengan pemerintah atau lembaga donor internasional. Perbedaan-perbedaan tersebut menunjukkan bahwa NGO tidaklah homogen, tetapi merupakan spektrum aktor yang memiliki peran beragam dalam pembangunan sosial, advokasi kebijakan, diplomasi publik, serta penguatan masyarakat sipil baik di tingkat lokal maupun global.

Korten (1990), mengklasifikasikan NGO menjadi empat jenis berdasarkan peran dan fungsinya:

1. Voluntary NGOs

Merupakan organisasi yang didasarkan pada komitmen terhadap nilai-nilai sosial dan advokasi, dengan fokus utama

pada upaya kemanusiaan serta pengembangan masyarakat. Organisasi ini berperan dalam memperkuat masyarakat sipil dan mendorong perubahan sosial melalui berbagai inisiatif independen.

2. ***Public Service Contractors*** (PSCs)

Berfungsi sebagai organisasi nirlaba yang berorientasi pasar, menyediakan layanan kepada publik melalui kontrak pemerintah atau pendanaan donor. Mereka sering kali bekerja dalam bidang kesehatan, pendidikan, dan infrastruktur sosial untuk mengisi kesenjangan layanan yang tidak dapat dipenuhi oleh pemerintah secara langsung.

3. ***People's Organizations*** (POs)

Mewakili kepentingan anggotanya, dengan struktur kepemimpinan yang bertanggung jawab kepada anggotanya dan beroperasi mandiri.

4. ***Governmental Non-Governmental Organizations*** (GONGOs)

Organisasi yang dibentuk oleh pemerintah tetapi beroperasi dalam kerangka NGO. Meskipun disebut sebagai organisasi non-pemerintah, GONGOs sering kali digunakan sebagai alat diplomasi pemerintah untuk mendukung kebijakan negara dan memperkuat citra internasionalnya.

Etzioni (1964) mengatakan bahwa organisasi bukanlah entitas

yang terbentuk secara spontanitas, melainkan dirancang dengan sengaja dan disesuaikan untuk mencapai tujuan yang jelas. Lanskap hubungan internasional memandang negara sebagai kekuatan utama dalam politik global, namun dalam teori liberal terdapat tiga pendekatan berbeda, sebagai berikut (Spiro, 2008):

1. Pendekatan Domestik/*Two-Level-Approach*

Perspektif ini memandang NGO sebagai kepentingan publik atau kelompok penekan, berperan dalam membentuk kebijakan dengan beroperasi dalam kerangka politik nasional sekaligus berpartisipasi dalam negosiasi global.

2. Pendekatan Transnasional/*Constructivist Approach*

Perspektif ini memandang NGO berkontribusi untuk membentuk norma-norma global dan mempengaruhi tindakan negara dengan meningkatkan kesadaran publik, mendefinisikan isu-isu utama, dan memobilisasi dukungan publik di seluruh dunia.

3. Pendekatan Supranasional/*Institutional Approach*

Perspektif ini memandang NGO berkolaborasi dengan organisasi internasional dan negara untuk membantu mengembangkan, menerapkan, dan mengawasi. NGO tidak melemahkan kekuasaan negara tetapi sebaliknya, meningkatkan otoritas regulasi dan memperkuat sistem negara secara keseluruhan.

Sejalan dengan peran NGO dalam pengambilan keputusan global, NGO juga membangun jaringan internasional untuk berkolaborasi dan bertukar informasi. Dengan kemajuan komunikasi global, NGO semakin mampu membentuk masyarakat sipil internasional yang dinamis, menyatukan individu dan kelompok akar rumput dalam advokasi dan aksi kolektif. Di ruang terbuka ini, NGO memiliki kebebasan untuk menetapkan agenda dan memperjuangkan isu-isu global tanpa campur tangan negara. Hal ini memperkuat peran NGO sebagai agen perubahan yang tidak hanya berinteraksi dengan pemerintah tetapi juga dengan masyarakat secara langsung.

Klasifikasi NGO berdasarkan peran dan fungsinya menyoroti beragam kontribusi yang dapat mereka berikan kepada masyarakat. Bina Antarbudaya dan *AFS Intercultural Programs* selaras dengan kategori *Voluntary* NGO, karena misi utama mereka berfokus pada advokasi, pertukaran pendidikan, dan pengembangan masyarakat. Dengan memfasilitasi pembelajaran antarbudaya, kedua NGO ini membantu mengurangi stereotip dan kesalahpahaman yang dapat menyebabkan konflik. Upaya mereka berkontribusi pada pembangunan perdamaian dengan mempromosikan kesadaran lintas budaya dan *active global citizen* di kalangan generasi muda.

Menurut David Lewis dan Nazneen Kanji (2009), NGO memiliki tiga peran utama dalam pembangunan dan diplomasi internasional, yaitu sebagai *implementers*, *catalysts*, dan *partners*. Bina Antarbudaya dan AFS

adalah representasi dari bagaimana sebuah NGO dapat secara efektif menjalankan peran tersebut, sebagai berikut:

1. Sebagai pelaksana, NGO berperan dalam mendistribusikan sumber daya serta menyediakan barang atau jasa kepada masyarakat yang membutuhkan. Dalam konteks ini, kedua NGO mengelola program pertukaran pelajar dan merumuskan model pembelajaran antarbudaya AFS untuk pengembangan kompetensi kognitif, emosional, dan perilaku tertentu melalui pengalaman imersif dari program pertukaran pelajar tersebut. Dengan demikian, NGO tersebut tidak sekedar bertindak sebagai administrator program, tetapi juga memfasilitasi interaksi yang bermakna melintasi batas nasional dan mempertemukan keragaman budaya.
2. Sebagai katalisator, NGO berfungsi memicu perubahan sosial dan kebijakan melalui advokasi, edukasi, dan penyebaran nilai-nilai baru di tingkat lokal maupun global. Bina Antarbudaya dan AFS membantu membentuk persepsi, nilai, dan perilaku yang terkait dengan keberagaman, toleransi, dan kewarganegaraan global atau *global citizenship*. Melalui program tersebut, mereka menentang narasi stereotip yang dibentuk oleh media atau struktur historis yang mempengaruhi bagaimana kelompok saling memandang satu sama lain. Mengurangi bias etnosentris yang cenderung memandang budaya sendiri sebagai superior, bias ini dapat menimbulkan kesalahpahaman atau prasangka buruk terhadap budaya lain. Mekanisme ini bertujuan

menumbuhkan empati dan membangun perdamaian berkelanjutan di berbagai komunitas.

3. Sebagai mitra, NGO menjalin kemitraan dengan berbagai pihak, termasuk pemerintah, sektor swasta, dan organisasi internasional untuk mencapai tujuan bersama. Kedua NGO ini terlibat dalam hubungan kolaboratif dengan kementerian pemerintah, kedutaan, yayasan pendidikan internasional, dan aktor masyarakat sipil. Kemitraan tersebut merefleksikan meningkatnya ketergantungan antara aktor negara dan non-negara dalam mengupayakan program yang bermanfaat bagi masyarakat yang dapat diakses secara luas. Melalui inisiatif pertukaran pelajar ini, Bina Antarbudaya dan AFS menunjukkan bagaimana masyarakat sipil dapat memainkan peran dalam diplomasi antar negara.

Dari perspektif hubungan internasional, peran Bina Antarbudaya dan *AFS Intercultural Programs* dapat dianalisis melalui berbagai sudut pandang teoritis. Pendekatan Domestik melihat NGO sebagai kelompok kepentingan publik yang mempengaruhi kebijakan pendidikan dalam kerangka nasional, sekaligus terlibat dalam pertukaran global. Pendekatan Transnasional mengakui peran Bina Antarbudaya dan *AFS Intercultural Programs* dalam mengadvokasi pendidikan antarbudaya, yang mempengaruhi diplomasi antar-masyarakat suatu negara. Sementara itu, Pendekatan Supranasional menyoroti kolaborasi Bina Antarbudaya dan *AFS Intercultural Programs* dengan lembaga pemerintah dan organisasi

internasional untuk mengembangkan program pendidikan.

Berdasarkan penjelasan di atas, peneliti menggunakan konsep ini karena melihat Bina Antarbudaya dan *AFS Intercultural Programs* menunjukkan bagaimana NGO dapat berkontribusi pada kerja sama bidang pendidikan internasional. Kegiatan Bina Antarbudaya dan *AFS Intercultural Programs* dalam mempromosikan pembelajaran antarbudaya antara Indonesia dan AS menggarisbawahi peran NGO yang lebih luas dalam praktik diplomasi publik. Dengan menjembatani kesenjangan antara pemerintah, masyarakat dan lembaga global, kedua organisasi tersebut bisa menjadi contoh partisipasi NGO dalam membentuk dunia yang lebih terhubung dan harmonis melalui kerja sama pendidikan.

2.4 *Soft Power*

Menurut Umar Suryadi Bakry, dalam buku studi *Hubungan Internasional*, konsep *power* tidak sepenuhnya dimaknai sebagai kekuasaan, tetapi memiliki banyak makna. *Power* bisa dimaknai sebagai kekuasaan itu sendiri, kekuatan (*forces*), pengaruh (*influence*), kewenangan (*authority*), kapasitas (*capacity*), kemampuan (*ability*), dan kapabilitas (*capability*). Sementara menurut Nye, mendefinisikan *power* sebagai kemampuan untuk mempengaruhi orang lain agar memperoleh sesuatu yang diinginkan. Seseorang dapat mempengaruhi perilaku orang lain dengan tiga cara yaitu ancaman yang memaksa (*threats of coercion*),

pembujukan dan pembayaran (*inducements and payments*), dan daya tarik yang membuat orang lain menginginkan apa yang diinginkan. Dari ketiga cara tersebut, *power* dibagi menjadi tiga jenis yaitu *hard power*, *smart power*, dan *soft power*.

Soft power (juga dikenal sebagai *co-optive power*), yang diperkenalkan oleh *Joseph S. Nye* pada akhir abad ke-20, merupakan kemampuan suatu negara untuk mencapai tujuannya bukan melalui paksaan atau kompensasi, melainkan melalui ketertarikan dan persuasi. Nye menyebut bahwa daya tarik bisa bersumber dari budaya, nilai-nilai politik, serta kebijakan publik yang dinilai sah dan bermoral oleh komunitas internasional. Dengan kata lain, *soft power* bergantung pada kemampuan suatu negara untuk membentuk preferensi negara lain dengan cara yang dianggap sah dan menarik.

Tidak seperti *hard power*, yang mengandalkan kekuatan militer dan ekonomi, *soft power* mengutamakan pada daya tarik budaya, ideologi, dan keterlibatan diplomatik. Kekuatan militer menjadi lebih sulit digunakan karena nasionalisme dan kesadaran sosial masyarakat telah meningkat, bahkan di negara-negara rentan. Mereka akan cenderung menolak campur tangan asing, sehingga membuat intervensi militer lebih menantang, mahal, dan kurang efektif. Oleh karena itu, modernisasi, urbanisasi, dan peningkatan komunikasi di negara berkembang meningkatkan variasi aktor dalam pembentukan kebijakan dan mempengaruhi pengambilan keputusan.

Ketika budaya dan nilai-nilai politik suatu negara beresonansi secara global, negara lain akan cenderung menyelaraskan agendanya secara sukarela. Transformasi politik, ekonomi, dan sosial telah memperkuat peran strategi non-koersif seperti diplomasi budaya, daya tarik ideologis, dan kepemimpinan institusional. Di era globalisasi, masyarakat yang semakin terhubung membuat persuasi lebih berpengaruh dibandingkan kekuatan militer atau ekonomi. Akibatnya, diplomasi publik mengalami evolusi, menuntut pendekatan yang lebih adaptif dan proaktif. Diplomat, tidak hanya berperan sebagai perwakilan negara, tetapi juga sebagai aktor strategis dalam membentuk persepsi internasional dan mendorong dialog lintas budaya.

Konsep *soft power* yang berfokus pada pembentukan preferensi internasional melalui daya tarik, manajemen citra nasional menjadi komponen kunci dalam strategi diplomasi. Negara harus mampu menavigasi tantangan globalisasi untuk mempertahankan pengaruhnya dengan membentuk narasi yang menarik. Citra nasional yang kuat dapat memperkuat hubungan diplomatik, meningkatkan legitimasi global, dan menarik investasi asing.

Menurut Hall (1997) *soft power* berfungsi sebagai bentuk *meta-power*, yaitu kekuatan yang membentuk struktur sosial yang merupakan tempat negara dan aktor non-negara berinteraksi. Berbeda dengan *hard power* yang mengedepankan insentif material atau koersif untuk mencapai tujuannya, *soft power* memungkinkan negara menetapkan agenda

internasional, mempengaruhi persepsi global, serta melegitimasi kebijakan melalui diplomasi budaya, daya tarik ideologis, dan kelembagaan. Dalam praktik hubungan internasional, *soft power* efektif karena menciptakan kerja sama dan keselarasan yang tampak alami, bukan dipaksakan.

Menurut Giulio M. Gallarotti (2011) umumnya *soft power* menghindari konflik kepentingan langsung yang sering muncul dalam kekuasaan koersif. Konsep ini membentuk preferensi tanpa menimbulkan resistensi terbuka, menjadikan strategi yang saling menguntungkan dibandingkan model persaingan *zero-sum*. Secara konseptual, *soft power* dapat dikategorikan menjadi dua sumber utama:

1. Sumber Internasional yang mencakup strategi diplomatik, kerja sama multilateral, dan upaya kemanusiaan.
2. Sumber Domestik yang mencakup stabilitas politik, pembangunan ekonomi, dan nilai-nilai masyarakat.

Elemen-elemen tersebut secara kolektif berkontribusi pada pembangunan citra dan legitimasi suatu bangsa di panggung dunia. Dengan demikian, *soft power* berfungsi sebagai mekanisme integratif dalam praktik hubungan internasional.

Salah satu bentuk *soft power* paling efektif adalah diplomasi pendidikan. Nye (1998) berpendapat bahwa program pertukaran pelajar berperan penting dalam difusi norma, memungkinkan negara untuk menanamkan kerangka politik, budaya, dan ideologisnya dalam

masyarakat asing. Secara historis, AS dan Uni Soviet menggunakan pertukaran akademik sebagai instrumen geopolitik selama Perang Dingin, yang menunjukkan bahwa investasi jangka panjang dalam pendidikan dapat memperkuat pengaruh internasional. Program beasiswa, kemitraan universitas, dan kolaborasi akademik tidak hanya meningkatkan reputasi suatu negara, tetapi juga membangun modal sosial-politik serta memperkuat hubungan diplomatik dan aliansi.

Soft power juga berfungsi sebagai instrumen strategis dalam mengurangi konflik dan mempererat hubungan internasional. Negara dapat menghindari ketegangan geopolitik tanpa mengandalkan kekuatan koersif melalui diplomasi preventif dan resolusi konflik berbasis dialog serta nilai-nilai bersama. Dengan memanfaatkan diplomasi budaya dan institusi internasional, negara dapat membangun konsensus dalam kerja sama multilateral menciptakan sinergi diplomatik, serta memperkuat tata kelola global (Gallarotti, 2011). Oleh karena itu, *soft power* menjadi instrumen kunci dalam membentuk tatanan dunia berbasis daya tarik dan legitimasi.

Terkait topik penelitian ini, pendekatan *soft power* menjadi relevan dalam menganalisis kontribusi aktor non-negara dalam mendukung diplomasi publik, khususnya dalam konteks hubungan bilateral Indonesia dan AS. Bina Antarbudaya sebagai mitra *AFS Intercultural Programs*, berperan sebagai organisasi non-pemerintah yang memfasilitasi program pertukaran lintas negara. Melalui diplomasi pendidikan, kedua lembaga

ini turut membantu meningkatkan *soft power* kedua negara dalam membangun citra yang positif, memperkuat pemahaman antarbudaya, serta menciptakan hubungan jangka panjang antara masyarakat kedua negara. Peserta program pertukaran diberikan kesempatan untuk tinggal dan belajar di lingkungan budaya yang berbeda, dan melihat perspektif kehidupan masyarakat setempat. Interaksi ini tidak hanya memperkaya pengalaman individu, tetapi juga berkontribusi pada pembentukan jejaring antarwarga yang mendukung tujuan diplomasi publik yang lebih luas.

Interaksi antarbudaya yang terjalin tidak hanya memperkaya pengalaman individu, tetapi juga berkontribusi dalam memperkuat toleransi dan saling menghormati perbedaan, baik dalam aspek agama, adat, sistem pendidikan, maupun gaya hidup. Pemahaman akan keragaman tersebut membantu mengurangi prasangka dan stereotip negatif yang sering kali muncul akibat ketidaktahuan atau informasi yang tidak lengkap. Dengan demikian, interaksi semacam ini menjadi contoh implementasi *soft power* yang dijalankan melalui diplomasi publik, di mana kekuatan budaya, nilai, dan pendidikan digunakan sebagai sarana untuk membangun hubungan yang harmonis antarbangsa.

Dalam hal ini keterlibatan organisasi non-pemerintah seperti Bina Antarbudaya dan *AFS Intercultural Programs* memainkan peran strategis sebagai fasilitator pertukaran budaya yang bersifat *people-to-people*. Melalui pendekatan yang berbasis pada pengalaman langsung dan interaksi antarbudaya, kedua NGO ini secara tidak langsung membantu

memperkuat citra positif negara asal masing-masing peserta, serta mendukung terciptanya hubungan bilateral yang berkelanjutan.

Seperti yang dijelaskan oleh Nye sebelumnya, daya tarik (*attraction*) merupakan bentuk kekuatan yang bersifat kooperatif, bukan memaksa, dan bergantung pada hal yang tidak berwujud seperti legitimasi, kredibilitas moral, dan kepercayaan. Serupa dengan praktik dalam kepemimpinan organisasi atau *community based policing*, di mana keberhasilan bergantung pada kemampuan untuk membuat orang lain menerima terhadap nilai dan tujuan bersama. Dalam konteks kerja sama pendidikan pada program pertukaran pelajar ini, alumni program berpotensi menjadi *agent of influence* yang secara sukarela mendukung hubungan bilateral karena mengalami langsung nilai-nilai dari negara mitra. Dengan demikian, program pertukaran pelajar seperti KL-YES dan *YES Abroad* merupakan manifestasi dari aset *soft power* AS yang mengedepankan nilai bersama dan pencapaian tujuan melalui ketertarikan (*attraction*).

Berdasarkan landasan teoritis yang telah dijelaskan sebelumnya, penelitian ini menggunakan konsep *soft power* untuk menganalisis peran Bina Antarbudaya dan *AFS Intercultural Programs* sebagai NGO dalam mendukung kerja sama pendidikan antara Indonesia dan AS. Mengacu pada *soft power* yang dikemukakan Nye, kekuatan non-koersif seperti nilai-nilai budaya, sistem pendidikan, dan kebijakan luar negeri yang

bersifat atraktif menjadi instrumen penting dalam membangun pengaruh internasional. Dalam hal ini, diplomasi publik menjadi saluran utama penyampaian *soft power*, yaitu melalui keterlibatan langsung dengan masyarakat asing untuk membentuk opini dan persepsi positif negara masing-masing.